

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA PEMBERSIHAN (CLEANING SERVICE)
PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA
PELAYANAN & JARINGAN SITUBONDO**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

MAJELIS RINDO AKTE
NIM. 010903101136

Asal :	Hadiah	Klass
Terima :	10 MAR 2005	336.24
No. induk :		AKT
Pengatalog :		P

Dosen Pembimbing :

Drs. RAHMAT MURJANA S, MM
NIP. 130 523 056

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2005**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL dan POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Majelis Rindo Akte
NIM : 010903101136
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (*Cleaning Service*) Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Area pelayanan & Jaringan Situbondo

Jember, 23 Desember 2004

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. RAHMAT MURJANA S,MM

NIP. 130 523 059

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Majelis Rindo Akte
NIM : 01903101136
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Dipolma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA PEMBERSIHAN (*CLEANING SERVICE*) PADA PT. PLN
(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN &
JARINGAN SITUBONDO

Hari : Sabtu
Tanggal : 29 Januari 2005
Jam : 15.30
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. SUTOMO, M.si (Ketua)
NIP. 131 965 845
2. Drs. RAHMAT MURJANA S, MM (Sekertaris)
NIP. 130 523 059
3. M. HADI MAKMUR, S.Sos (Anggota)
NIP. 132 288 336

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,

Dr. H. UUNG NASDIA, BS.W, MS
NIP. 130 674 836



PERSEMBAHAN

Laporan ini Kupersembahkan Kepada :

Ayah Tersayang Maddowi dan Ibu Endang Cahya Rini, yang dengan tiada hentinya memanjatkan Doa dan memberikan dukungan serta nasehat dalam setiap langkahku.

Adik-adiku tersayang Wanti, Tika, dan Heni.

Dian Herawati yang dengan setia dan tulus memberikan semangat dan dukungan selama ini.

Keluarga besar Pondok Sastra

Almamaterku tercinta.



PERSEMBAHAN

Laporan ini Kuperssembahkan Kepada :
Ayah Tersayang Maddowi dan Ibu Endang Cahya Rini, yang dengan tiada
hentinya memanjatkan Doa dan memberikan dukungan serta nasehat dalam setiap
langkahku.

Adik-adiku tersayang Wanti, Tika, dan Heni.

Dian Herawati yang dengan setia dan tulus memberikan semangat dan dukungan
selama ini.

Keluarga besar Pondok Sastra

Almamaterku tercinta.



MOTTO

“ Janganlah kamu memberi karena mengharapkan imbalan yang lebih baik ”

(QS Al-Muddststsr (74):6)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata, dengan judul “ Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (Cleaning Service) Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo “. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan penyelesaian laporan ini Penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan, saran serta petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ung Nasdia, BS.W, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Rahmat Murjana S, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan perhatiannya dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan baik.
5. Bapak Dwi Sungkowo S.Sos, MP selaku Dosen Wali yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama ini.
6. Bapak Sarjono selaku Supervisor Sumber Daya Manusia (SDM), Bapak Kusnadi selaku Asman Keuangan, Ibu Malicali selaku Supervisor Pengendalian Pendapatan, Ibu Sri, Bapak Kuslan, Bapak Heru, Bapak Dini, dan seluruh karyawan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo atas kerja sama dan bantuannya selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

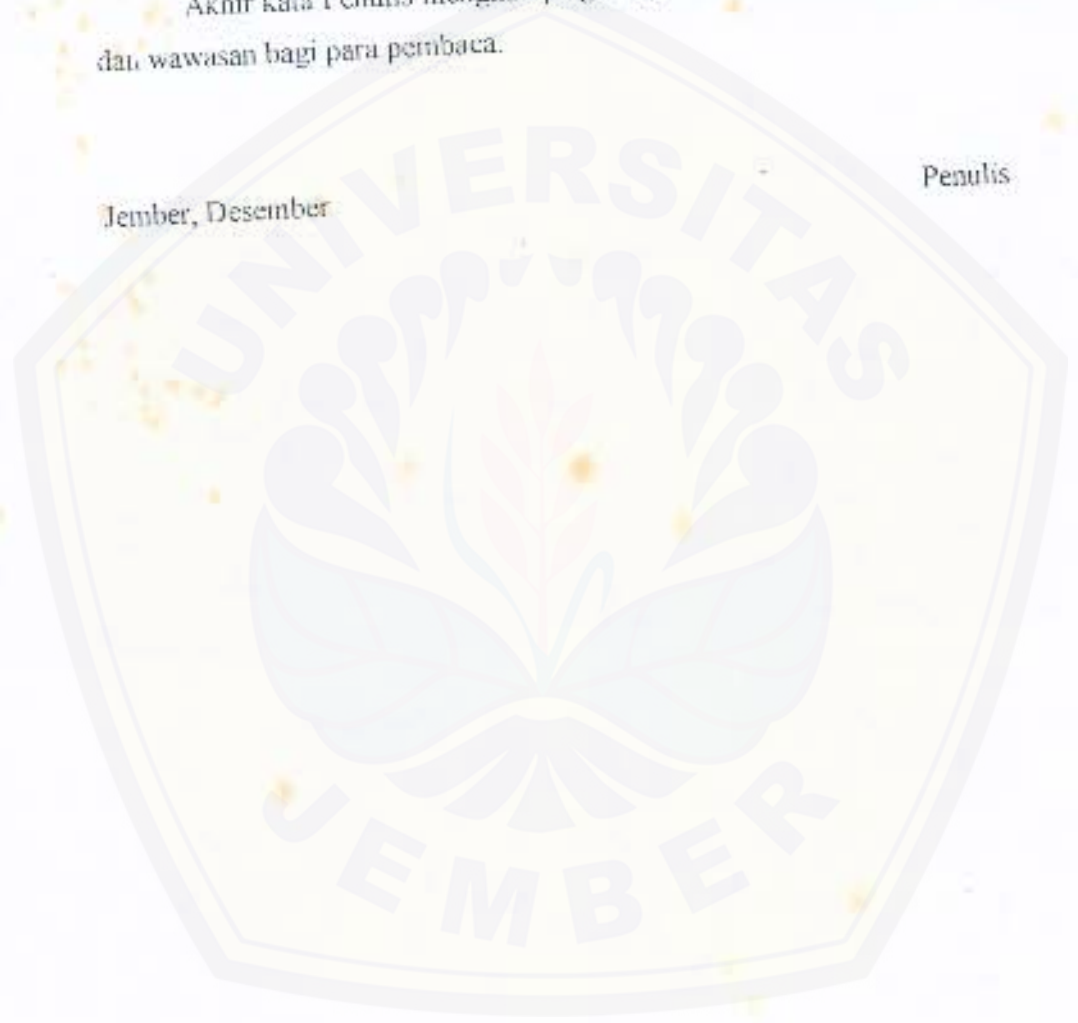
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan semangat kepada Penulis sehingga Laporan Kerja Nyata ini dapat terselesaikan.

Semoga segala yang diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam laporan ini, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhir kata Penulis mengharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca.

Jember, Desember

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	2
1.2.1 Tujuan Praktek.....	3
1.2.1 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Latar Belakang Sejarah PT. PLN (Persero).....	4
2.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	
Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.....	8
2.2.1 Struktur Organisasi.....	8
2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab.....	10
2.3 Personalia Perusahaan.....	16
2.3.1 Jam Kerja	16
2.3.2 Jumlah Pegawai.....	16

2.4 Kegiatan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo	17
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	19
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	21
3.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 23	21
3.2.2 Dasar Hukum Pengenaan Pasal 23	22
3.2.3 Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (<i>Cleaning Service</i>) Di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo	26
3.2.4 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (<i>Cleaning Service</i>) Di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo	30
3.3 Penilaian Kegiatan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo	31
IV. PENUTUP	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Jam Kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.....	16
2. Data Jumlah Pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.....	17
3. Kegiatan Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur area Pelayanan & Jaringan Situbondo.....	20
4. Jasa Penghasilan Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto.....	25
5. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Bulan Januari 2004 – Maret 2004.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Jam Kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.....	16
2. Data Jumlah Pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.....	17
3. Kegiatan Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur area Pelayanan & Jaringan Situbondo.....	20
4. Jasa Penghasilan Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto.....	25
5. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Bulan Januari 2004 – Maret 2004.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Struktur Organisasi.....	9
2. Skema Pelaksanaan PPh Pasal 23.....	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.
2. Surat Pernyataan Praktek Kerja Nyata.
3. Surat Keterangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo
4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
5. Daftar Kegiatan Konsultasi.
6. Faktur Pajak.
7. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23.
8. Surat Pemberitahuan Masa (SPT, Masa) PPh Pasal 23.
9. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
10. Laporan Realisasi Penerimaan Negara Berupa Pajak Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.
11. Daftar Bukti Pemungutan dan Pemotongan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Oleh Pihak Lain PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.
12. Surat Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo dengan Koperasi Karyawan Lisna Tentang Jasa Pembersihan (Cleaning Service)



I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia memerlukan dukungan kebijaksanaan fiskal yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dalam negeri, mengeffisienkan pengeluaran negara dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Pemerintah berupaya mendapatkan dari sektor migas dan non migas. Penerimaan dari sektor migas dapat berasal dari minyak dan batu bara. Namun karena sektor migas suatu saat akan mengalami kelangkaan maka penerimaan difokuskan pada penerimaan dari sektor non migas yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalty, yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. (Markus dan Yujana, 2002 : 1)

Mengingat begitu pentingnya fungsi pajak maka merupakan tantangan utama bagi pemerintah untuk mendapatkan dana yang sebesar-besarnya dari sektor pajak. Berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satu cara melalui berbagai jenis pajak. pemerintah berupaya memperoleh pendapatan dari sektor pajak sebagai salah satu komoditi utama untuk menopang kesinambungan pembangunan negara.

Seiring meningkatnya perkembangan teknologi modern sekarang ini masyarakat terbiasa hidup serba menggunakan alat-alat elektronik yang tidak terlepas dari penggunaan tenaga listrik. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan tenaga listrik dan merupakan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Atas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, khususnya dalam jasa pengadaan tenaga listrik oleh pemerintah dikenakan pajak.

Pajak yang dikenakan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 170 /PJ/ 2002 tentang jenis pajak dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Waluyo, 2000:176).

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo dalam pelayanannya tidak hanya melayani masyarakat dalam hal jasa kelistrikan, tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan pembersihan kantor, pembersihan halaman, perawatan tanaman dan semua jasa yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa atau konsumen.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo melakukan penghitungan Pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pembersihan (*cleaning service*) tidak berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 170/PJ/2002 tentang jenis pajak dan perkiraan penghasilan neto. Besarnya tarif menurut Kep Dirjen Pajak Nomor KEP - 170 /PJ/2002 tentang perkiraan penghasilan neto atas jasa pembersihan (*cleaning service*) sebesar 10%, pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo besarnya tarif perkiraan penghasilan neto sebesar 40% sehingga terjadi suatu penyimpangan perpajakan Berdasarkan uraian

tersebut maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo penulis mengangkat judul “ **Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (*cleaning service*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo**”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pembersihan (*cleaning service*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.
- b. Untuk memperoleh pengalaman serta studi tambahan dari perusahaan khususnya yang berhubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pembersihan (*cleaning service*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal dunia Perpajakan.
- b. Dapat mengetahui tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pembersihan (*cleaning service*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.
- c. Memperdalam keterampilan serta pemahaman pribadi dalam bidang Perpajakan khususnya dalam hal pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pembersihan (*cleaning service*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Latar Belakang Sejarah PT. PLN (Persero)

Sejarah kelistrikan di Indonesia sejak tahun 1898 jaman pemerintahan Hindia Belanda. Perkembangan pengelolaannya dilakukan pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Berdasarkan kurun waktunya, perkembangan Perusahaan Listrik Negara dibagi menjadi lima periode:

a. Periode sampai tahun 1943 (Perusahaan Listrik Negara)

Setelah Perusahaan Listrik yang berpusat di Negeri Belanda didirikan di wilayah Indonesia, pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti *Elektricitet Bedriff Batavia* (1893), *Elektricitet Bedriff Medan* (1903), *Elektricitet Bedriff Surabaya* (1907) dialihkan ke Perusahaan Swasta. Pendirian Perusahaan Listrik Belanda di Indonesia antara lain :

1) Tahun 1913

Perusahaan listrik *NV. NIGM* kemudian menjadi *NV. OGEM*, wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), *Meesterroomelis* (Jatinegara), Tangerang, Cirebon, Kebayoran Lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang), dan Manado.

2) Tahun 1914

Perusahaan Listrik *NV. ANIEM*, wilayah operasi meliputi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukit Tinggi, Pontianak, dan Ambon.

3) Tahun 1915

Perusahaan Listrik *ELECTRA*, Wilayah operasi meliputi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan *SEM*, daerah operasinya Surakarta.

4) Tahun 1923-1928

Perusahaan Listrik *NV. GERFO*, daerah operasi meliputi Bandung, Bogor serta kota se-Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.

5) Tahun 1925

Perusahaan Listrik *OJEM*, daerah operasi Panarukan.

6) Tahun 1927

Perusahaan Listrik *EMR*, Daerah operasi Rembang dan Bojonegoro.

7) Tahun 1939

Perusahaan Listrik *EMB*, daerah operasi Banyumas.

b. Periode 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang).

Masa ini Perusahaan Listrik Swasta milik Belanda di Indonesia dikuasai Jepang dan Perusahaan Listrik Swasta yang ada di pulau Jawa oleh angkatan darat Jepang diganti sebagai :

1) *Jawa Denki* Yogyakarta berpusat di Jakarta.

2) *Seibu Jawa Denki Sha* untuk wilayah Jawa Barat.

3) *Chobu Jawa Denki Sha* untuk wilayah Jawa Tengah.

4) *Tobu Jawa Denki Sha* untuk wilayah Jawa Timur.

c. Periode 1945-1950 (Setelah Proklamasi Kemerdekaan / masa revolusi).

Selama periode ini, pengelolaan Perusahaan Listrik dilakukan oleh Jawatan Listrik dan Gas di daerah yang dikuasai Pemerintah Indonesia. Pengambilalihan pimpinan Kesatuan Aktif Karyawan Listrik terjadi pada tanggal 21 September 1945, kemudian meluas ke Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan di luar Jawa. Pengambil alihan pimpinan Perusahaan Listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah (Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga) di Jakarta. Tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta berdasarkan Penetapan Pemerintah nomor 1 / SD /1945. Pada masa agresi militer Belanda I dan II, pengelolaan Perusahaan Listrik di Indonesia dilakukan sebagian oleh Jawatan Listrik dan Gas bersama Perusahaan Listrik Swasta Belanda.

d. Proses Nasionalisasi Perusahaan Listrik Indonesia dalam periode 1984 sebagai berikut :

1) Perusahaan Listrik Asing di Indonesia antara lain:

NV. ANIEM, NV. GEBEO, NV. OGEM dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Listrik Negara di bawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen PUT.

2) Organisasi Buruh *SBLGI Non Vaksentrol* menuntut diadakannya Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik Belanda. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa Belanda, maka Perusahaan Listrik *NV. OGEM* (1 Januari 1954) dan *NV. ANIEM* (1 Nopember 1954) digabung ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementerian PUT. Tahun 1958 DPR dan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor P25/4517 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti Perusahaan Listrik Negara.

3) Berdasarkan Undang-undang Nomor 67/1961 terbentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam salah satu wadah organisasi. Dan PUT Nomor 9/PRT/1964 BPU-PLN dibekukan

4) Berdasarkan peraturan Nomor 1/PRT/1965 BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Keputusan PUTL Nomor 1/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang untuk merencanakan, membangun, dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh wilayah

Republik Indonesia. Dalam Kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energi ke Departemen Pertambangan, sedangkan bidang ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet pembangunan IV Direktorat Jenderal Ketenagaan diganti menjadi Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga Perusahaan Listrik Negara dapat memusatkan fungsinya yaitu pembinaan perusahaan kelistrikan pengembangan energi baru

e. Periode 1985-sekarang

- 1) Tenaga listrik untuk peningkatan kemakmuran, kesejahteraan rakyat, mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, maka penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Perusahaan Listrik Negara merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mengusahakan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Selanjutnya sebagai perintis usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dilaksanakan pihak swasta.
- 2) Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1994 tentang Perubahan Status Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi PT PLN (Persero) terhitung tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi Perusahaan yaitu orientasi pelanggan, orientasi pada perubahan serta menjadi perusahaan modern yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri. juga telah disahkan Menteri Kehakiman Nomor C2-11.519/HK.01.01 Tahun 1994 dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Nomor 6731 Tahun 1994. PT. PLN

(Persero) Area Pelayanan & Jaringan Situbondo merupakan cabang dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang membawahi Unit Pelayanan Panarukan, Unit Jaringan Panarukan, Unit Pelayanan & Jaringan Besuki, Unit Pelayanan & Jaringan Bondowoso, dan Unit Pelayanan & Jaringan Asembagus (mulai 7 April 2003). Saat ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo memiliki 122 pegawai dengan status pegawai tetap dan berlokasi di Jl. Cempaka No. 35 Situbondo

2.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo

2.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan Situbondo, Penggolongan bagian perusahaan berdasarkan fungsi dan bentuk struktur organisasinya adalah garis dan staf. Manajer Area Pelayanan & Jaringan sebagai pimpinan tertinggi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo membawahi 5 Unit Pelayanan dan Jaringan, yaitu :

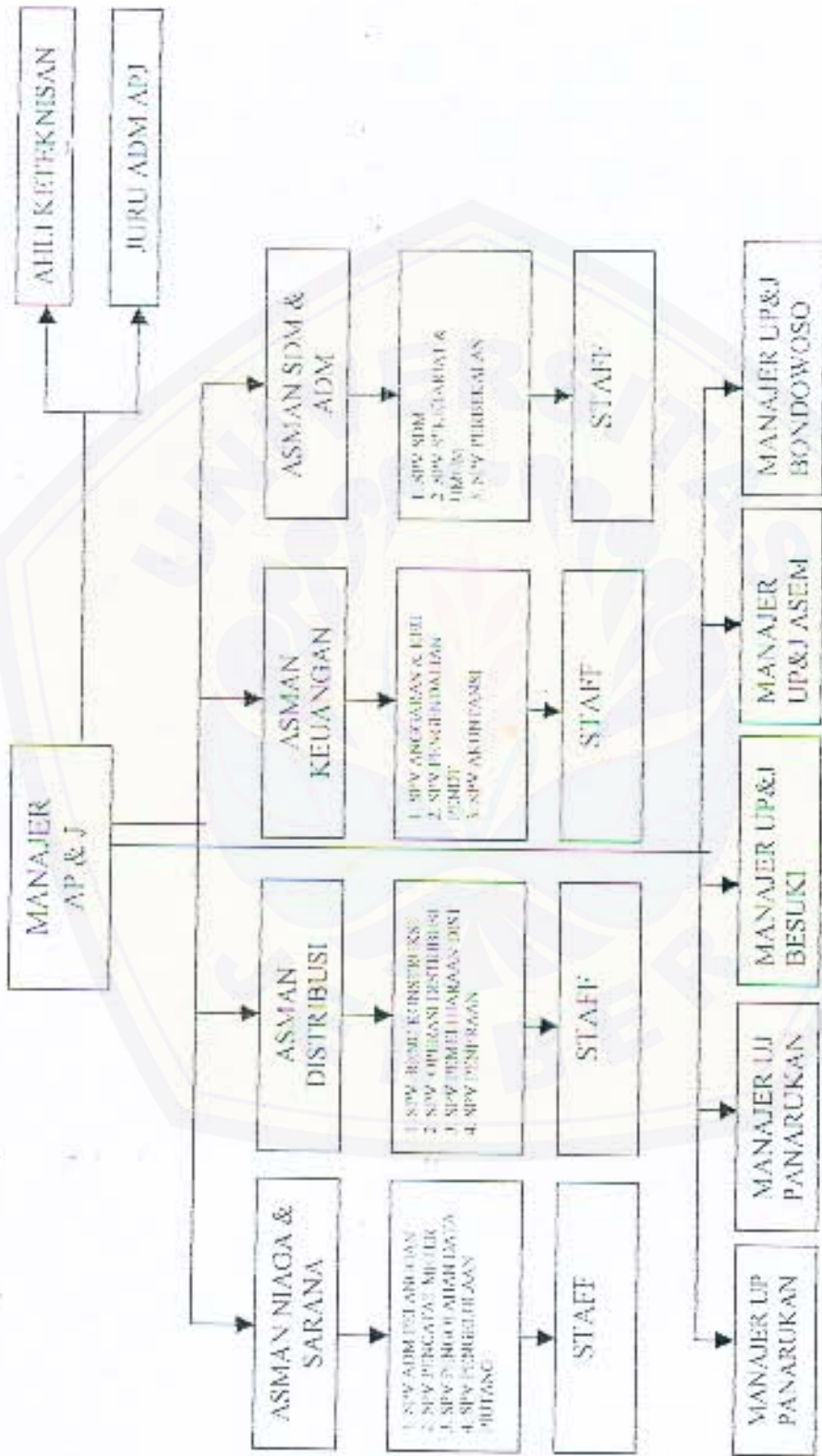
- 1) Unit Pelayanan Panarukan
- 2) Unit Jaringan Panarukan
- 3) Unit Pelayanan & Jaringan Besuki
- 4) Unit Pelayanan & Jaringan Bondowoso
- 5) Unit Pelayanan & Jaringan Asembagus

Serta membawahi 4 Asisten Manajer (ASMAN) dalam Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo, yaitu :

- 1) Asman Niaga dan Sarana
- 2) Asman Distribusi
- 3) Asman Keuangan
- 4) Asman Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi

Tiap Asman bertanggung jawab atas Supervisor yang berada di bawahnya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.



Sumber Data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo, Maret 2004

2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab tiap bagian pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Manajer Area Pelayanan & Jaringan

Merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas pencapaian pendapatan, penjualan tenaga listrik, pelayanan pelanggan, pengopresian, pemeliharaan jaringan distribusi di daerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja perusahaan.

b. Asman Niaga dan Sarana

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan pelanggan atau calon pelanggan.
- 2) Menyusun dan memelihara Data Induk Pelanggan (DIP) dan Data Induk Saldo (DIS).
- 3) Mengawasi kegiatan pencatatan meter dan melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembacaan meter.
- 4) Melaksanakan dan memonitor proses pengolahan data dalam rangka pembuatan tagihan listrik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
- 5) Mengamankan dan mengendalikan pendapatan dengan melaksanakan administrasi pelanggan secara tertib.
- 6) Melaksanakan pengawasan dan mengkoordinir kegiatan penagihan dalam rangka pengelolaan piutang.
- 7) Menyusun standar mutu pelayanan serta mengendalikan pencapaiannya.
- 8) Menyusun laporan sesuai tugas bagian niaga.

Supervisor Administrasi Pelanggan

Melaksanakan pelayanan kepada calon pelanggan, memonitor keluhan pelanggan, memeriksa PK, BA, kwitansi, PDL, mengatur dan mengarahkan kegiatan administrasi pelayanan pelanggan meliputi pelayanan pada calon pelanggan, pencatatan jumlah pelanggan, jenis tarif dan golongan rekening guna

kelancaran pelayanan, memberikan informasi mengenai penyaluran tenaga listrik, koordinasi dengan bagian lain.

Supervisor Pembacaan Meter (Cater)

Mengatur dan mengarahkan kegiatan pembacaan meter, aplikasi komputer dalam penyimpanan data, merencanakan, menyiapkan, dan mengendalikan kegiatan pembacaan, pencatatan dan perekam angka kedudukan meter alat pengukur meter pada tiap pelanggan meter serta pembacaan dan pencatatan penunjukan sakelar waktu, mengevaluasi kesalahan yang terjadi dan membuat laporan berkala.

Supervisor Pengolahan Data (Lahta)

Mengatur dan mengarahkan kegiatan pengolahan data yang meliputi aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi dan penyimpanan data guna menciptakan sistem informasi yang memadai.

Supervisor Pengolahan Piutang (La Piutang)

Mengatur dan mengarahkan kegiatan penagihan meliputi penagihan dan pengisian atau pengiriman rekening untuk pencapaian optimasi penagihan, memeriksa laporan hasil penagihan unit untuk dievaluasi

B. Asman Distribusi

- 1) Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani pelanggan pengembangan jaringan distribusi
- 2) Menyusun SOP dan mengatur pengoperasian jaringan distribusi
- 3) Menyusun rencana pemeliharaan dan melaksanakan pemeliharaan jaringan distribusi
- 4) Mengelola asset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan
- 5) Membuat data peta jaringan (*mapping*) dan memelihara akurasi data sesuai dengan perkembangan.

- 6) Mengendalikan dan mengawasi fungsi Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dan menyusun rencana pemeliharannya.
- 7) Melaksanakan analisa dan evaluasi susut distribusi serta menyusun upaya pengndaliannya
- 8) Membina dan mengembangkan PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan)
- 9) Menyusun laporan sesuai bidang tugas distribusi.

Supervisor Perencanaan Konstruksi (Ren Konst)

Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang etrkait untuk pelaksanaannya. memberi petunjuk bawahannya, mengkoordinasi pelaksanaan survey lokasi perolehan pembebasan tanah untuk pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik, menyusun usulan Rencana Anggaran Operasi (RAO) dan Usulan Anggaran Investasi (UAI) khusus distribusi dan konstruksi.

Supervisor Operasi Distribusi (Op Distribusi)

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan jaringan perbaikan gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik, menyusun rencana kerja membuat jadwal kegiatan operasi distribusi untuk pelaksanaan tugas, membuat laporan berkala sesuai dengan bidangnya.

Supervisor Pemeliharaan Distribusi (Har Distribusi)

Menyusun rencanakan kegiatan, membagi tugas membimbing bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program pemeliharaan distribusi serta membuat laporan pemeliharaan distribusi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, koordinasi dengan supervisor terkait dalam pemeliharaan distribusi untuk keadaan suplay listrik, mengevaluasi data dari jaringan operasi jaringan untuk bahan pemeliharaan distribusi.

Supervisor Peneraan

Mengawasi, memberikan petunjuk, membagi tugas kepada teknisi peneraan dan juru administrasi penerangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas penerangan sehingga sasaran penerangan dapat tercapai, mengawasi pemakaian tarif segel yang dipakai untuk menghindari penyalahgunaan, membuat laporan berkala

c. Asman Keuangan

- 1) Melaksanakan pencatatan dan pembukuan asset.
- 2) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan serta mengadakan rekonsiliasi dengan fungsi terkait.
- 3) Menyusun Rencana Anggaran Operasi (RAO) / Usulan Anggaran Investasi (UAI) sesuai dengan jadwal dan pedoman yang ada
- 4) Mengatur dan melaksanakan pengawasan atas penggunaan anggaran investasi maupun operasi.
- 5) Mengatur dan mengendalikan likuiditas keuangan secara optimal.
- 6) Melaksanakan supervisi tentang keuangan dan akuntansi terhadap unit asuhannya.
- 7) Menyusun Laporan Keuangan serta melaksanakan analisa dan evaluasi untuk merumuskan upaya perbaikannya
- 8) Menyusun laporan sesuai tugas bagian keuangan.

Supervisor Anggaran dan Keuangan

Penyiapan rencana kerja dan anggarannya, pemantauan anggaran belanja dan pendapatan Area pelayanan dan Jaringan. Pengolahan dana dan daur kas, pengasuransian harta kekayaan perusahaan, pencatatan pajak perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Supervisor Pengendalian Pendapatan

Melaksanakan pengurusan keuangan dan pajak, penyusunan anggaran belanja dan pendapatan satuan organisasi terkait, pengolahan dana dan daur kas

Supervisor Akuntansi

Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi, aktiva tetap, pekerjaan dalam pelaksanaan serta pembuatan laporan yang sesuai denganketentuan yang berlaku d. Asman Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi

- 1) melaksanakan administrasi kepegawaian, membuat perhitungan dan melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai sesuai ketentuan yang ada
- 2) Menyusun dan memelihara Data Induk Kepegawaian serta melaksanakan monitoring dan evaluasi SDM.
- 3) Melaksanakan pembinaan SDM serta menyusun rencana pengembangan SDM
- 4) Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian SDM dan Administrasi

Supervisor SDM

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keselamatan pegawai dan kesehatan kerja guna kelancaran tugasnya

Supervisor Sekretariat Dan Umum

Melaksanakan tata usaha kesekretariatan dan pengurusan rumah tangga serta keamanan lingkungan kerja

Supervisor Perbekalan

Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang perbekalan yang meliputi rencana pengadaan barang peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan

e. Manajer Unit Pelayanan

- 1) Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pelanggan, pengelolaan administrasi pelanggan, penagihan dan pengawasan piutang
- 2) Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembacaan meter, analisa dan evaluasi hasil pembacaan meter serta pengolahan hasil pembacaan meter.
- 3) Penetapan dalam pelaksanaan dalam Penyambungan Baru (PB), Perubahan Daya (PD) dan Perubahan Tarif
- 4) Pelaksanaan Koordinasi dengan Unit Jaringan (UJ) untuk menjamin keandalan pendistribusian tenaga listrik, kecepatan penyambungan dan pemutusan serta kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- 5) Pelaksanaan kegiatan administrasi personalia, pengelolaan kesekretariatan, pengendalian keuangan.

f. Manajer Unit Jaringan

- 1) Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sistem pendistribusian tenaga listrik, serta pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 2) Pelaksanaan Penyambungan Baru (PB), Perubahan Daya (PD) sesuai permintaan dari Unit Pelayanan (UP).
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Pelayanan (UP) untuk menjamin mutu dan keandalan pendistribusian tenaga listrik, kecepatan penyambungan dan pemutusan serta kegiatan Penertiban Tenaga Listrik (P2TL).
- 4) Pelaksanaan kegiatan administrasi personalia, pengelolaan kesekretariatan, pengendalian keuangan, serta perbekalan.

g. Manajer Unit Pelayanan Dan Jaringan

- 1) Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pelanggan, pengelolaan administrasi pelanggan, penagihan dan pengawasan piutang.
- 2) Pengawasan pembacaan meter, analisa dan evaluasi hasil pembacaan meter serta pengolahan hasil pembacaan meter.
- 3) Penetapan dan pelaksanaan Penyambungan Baru (PB), Perubahan daya (PD), dan Perubahan Tarif.

- 4) Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik, kegiatan Penriban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), kegiatan penyambungan dan pemutusan serat pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 5) Pelaksanan kegiatan administrasi personalia, pengelolaan kesekretariatan, pengendalian keuangan serta perbekalan.

2.3 Personalia Perusahaan

2.3.1 Jam Kerja

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan Situbondo menerapkan 5 hari kerja efektif kecuali piket, dengan jam kerja untuk hari Senin – Kamis adalah 8 jam dan untuk hari Jumat 7 jam. Untuk lebih jelasnya jam kerja PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan Situbondo dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 : Jam Kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo

HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT
1	2	3
Senin - Kamis	07.30 – 16,00	12.00 – 12.30
Jumat	07.30 – 16.00	11.30 – 13.00
Sabtu libur kecuali piket		
Untuk gangguan dilayani 24 jam		

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo, Maret 2004

2.3.2 Jumlah Pegawai

Sumber Daya Manusia yaitu tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan, begitu juga halnya dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo. Tenaga kerja yang dibutuhkan tentunya tenaga kerja yang handal dan betul betul ahli dibidangnya. Di lingkungan kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo terdapat 122 tenaga kerja. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 : Data Jumlah Pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo Per Pendidikan Keadaan Bulan April 2004

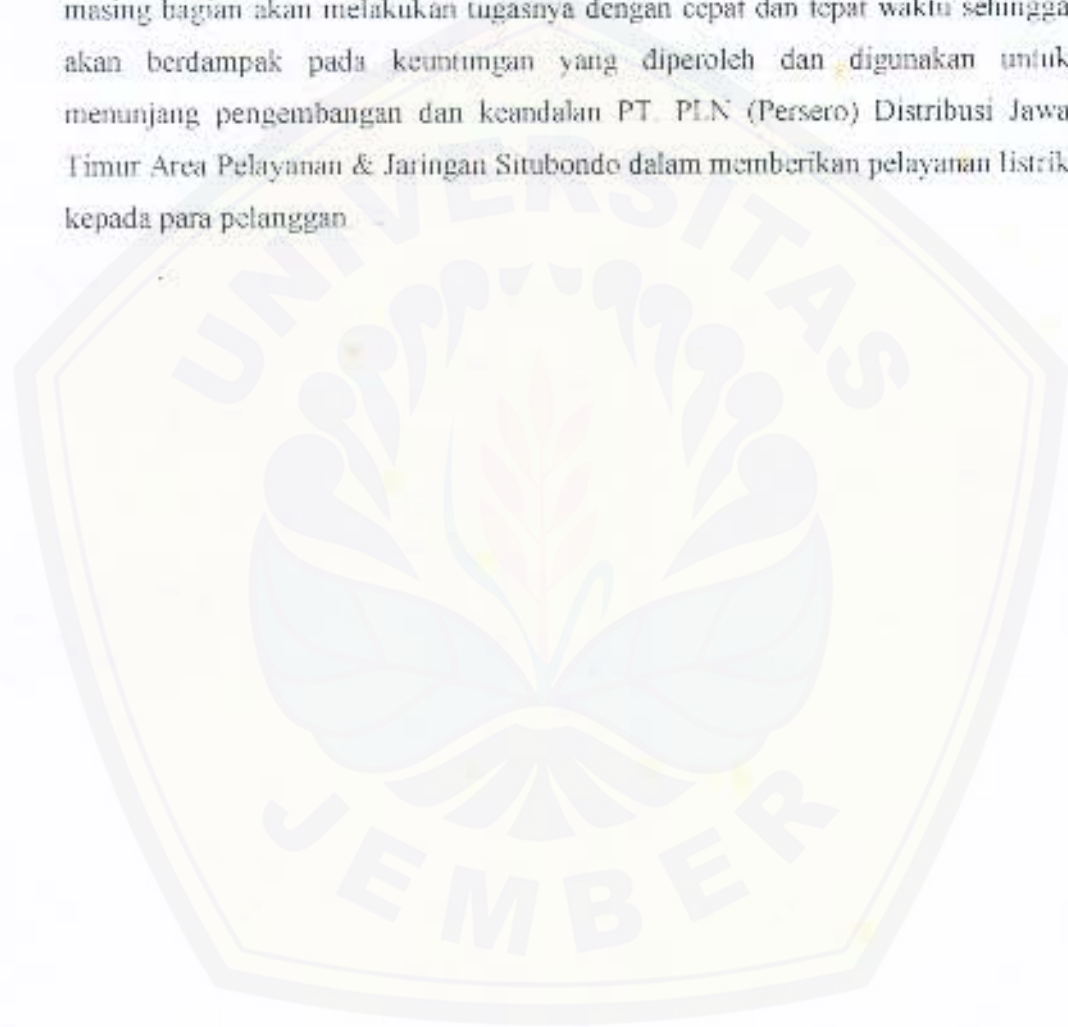
PENDIDIKAN	TEHNIK	NON TEHNIK	JUMLAH
1	2	3	4
STRATA I	2	8	10
DIPLOMA III	3	1	4
SLTA	42	42	84
SLTP			19
SEKOLAH DASAR			5
JUMLAH	47	51	122

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo, Maret 2004

2.4 Kegiatan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan. Dalam lingkungan kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo terdapat beberapa Unit Pelayanan dan Jaringan, yaitu Unit Pelayanan Panarukan, Unit Jaringan Panarukan, Unit pelayanan & jaringan Besuki, Unit Pelayanan & Jaringan Asembagus, dan Unit Pelayanan & jaringan Bondowoso. Setiap unit Pelayanan & Jaringan selalu bekerjasama dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik. Karena listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Unit Pelayanan & jaringan situbondo berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan listrik untuk para pelanggan. Pelayanan yang baik tidak akan terwujud apabila dalam perusahaan tidak dilakukakan suatu spesialisasi kerja.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo sebagai perusahaan besar dalam lingkungan kerjanya telah melakukan spesialisasi kerja, yang dimaksud spesialisasi kerja disini adalah pembagian kerja menjadi beberapa bidang yang kemudian dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang ahli dibidang masing-masing. Dengan adanya spesialisasi kerja ini, maka masing-masing bagian akan melakukan tugasnya dengan cepat dan tepat waktu sehingga akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh dan digunakan untuk menunjang pengembangan dan keandalan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Situbondo dalam memberikan pelayanan listrik kepada para pelanggan.





IV PENUTUP

Dengan selesainya Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini telah memberikan gambaran bagi penulis dan para pembaca tentang bagaimana “Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Area Pelayanan & Jaringan Situbondo”

Perubahan Undang-undang dan Peraturan sering kali terjadi di bidang perpajakan untuk itu setiap Wajib Pajak harus terus mengetahui memahami dan mengikuti perubahan yang ada, sehingga nantinya tidak merugikan Penerimaan Negara dan juga tidak merugikan Wajib Pajak sendiri.

Sebuah Perusahaan BUMN memang sudah sepatutnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Sebagai perusahaan yang memiliki banyak karyawan PT. PLN (Persero) memang harus peka terhadap perubahan Peraturan Perpajakan terutama Pajak Penghasilan Pasal 23.

Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Dengan selesainya Laporan ini sekali lagi penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan. Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta
- Markus, M dan Lalu. H. Yujana. 2002. *Pajak Penghasilan Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Terbaru*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, 2002, Nomor KEP-170/PJ/2002, *Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf e, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000*
- Tanpa Nama, 2000. *Undang-undang Pajak Tahun 2000*, Bandung: Citra Umbara
- Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: BPUJ
- Waluyo dan Wirawan. B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalbojo, Telp. (0331) 335500 - 331342, Fax. 0331 - 335500 Jember 6612
Email: fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. 136g / J.25.1.2/PP/9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Mengatakan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini

NO	NAMA	NIM
1.	Novanda Zaidi M	01 - 1020
2.	Majelis Riho A	01 - 1156

Untuk mengikuti program kegiatan magang di PT. PLN (Persero) Distribusi Jay
Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo selama 30 hari terhitung mu
tanggal 12 April 2004 s/d 11 Mei 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiat
magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 30 Maret 2004
Dekan

Drs. H. Moch Toerki
NIP. 130 524 832

Sebaran kepada Yth:

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kepala Pengajaran FISIP UNEJ.
3. Kepala Keuangan FISIP UNEJ.

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini ini saya :

Nama : MAJELIS RIDHO AKTE
 Tempat Tanggal Lahir : JEMBER , 17 NOPEMBER 1982
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : PRINGGOWIRAWAN SUMBERBARU RT.02 / RW.03
 Pendidikan : DIII / Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya akan mematuhi semua peraturan yang berlaku di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan Situbondo, termasuk larangan melakukan pemotretan data-data spesifikasi peralatan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan Situbondo.
2. Saya akan mematuhi semua petunjuk yang diberikan oleh Pejabat / Pegawai PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan yang ditugaskan membimbing saya.
3. Saya setuju, PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan tidak menanggung sesuatu apapun bila terjadi kecelakaan yang mungkin menimpa diri saya atau kerugian yang mungkin saya derita atas barang-barang saya pada saat melakukan Training / Kerja Praktek / Riset di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan yang langsung maupun tidak langsung terjadi karena keadaan ruangan, halaman instalasi dan peralatan PT. PLN (Persero).
4. Saya sanggup segera membayar sepenuhnya segala biaya yang langsung menimbulkan kerugian atau kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian saya.
5. Saya sanggup menanggung sendiri segala keperluan Training / Praktek Kerja / Riset, termasuk biaya perjalanan, penginapan dan sebagainya yang tidak menjadi tanggungan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan.
6. Saya sanggup tidak membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan, dan bahan-bahan yang saya peroleh dalam melakukan Training / Praktek Kerja / Riset di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan.

Situbondo, 15 Maret 2004
 Yang membuat :


 Manajer

PEKUN DWIATMANTO


 M412

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN & JARINGAN SITUBONDO

SURAT KETERANGAN

Nomor : .Kt / 492 / STB / 2004


Yang bertandatangan dibawah ini MANAGER PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN & JARINGAN SITUBONDO menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MAJELIS RIDHO AKTE
Tempat / Tanggal lahir : JEMBER , 11 NOPEMBER 1982
Mahasiswa dari : UNIVERSITAS JEMBER
N I M : 01 - 1020
Jurusan / Program Study : D-III PERPAJAKAN
Alamat Kampus : JL. KALIMANTAN TEGALBOTO JEMBER
Alamat Rumah : PRINGGO MRAWAN SUMBERBARU RT.02 /
RW. 03 TANGGUL JEMBER

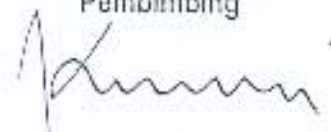
Telah melaksanakan Penelitian di Perusahaan kami selama 1 (satu) bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
MANAGER


PUGUH DWI ATMANTO

Situbondo, 11 MEI 2004
Pembimbing


KUSNADI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Higinolis Rudo Wito
Nomor Induk Mahasiswa : 014007101105
Alamat : Jl. Deltitung I n o 19 A
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Laporan : PELAKSANAAN PEBERONGGAN PAJAK PENGHASILAN...
BAB I. 23. LAYANAN JASA PEMBERESIHAN (CLEANING...
SERVICE). BADA PEL. PEN. (PASSENGER) DISTRIBUSI
JAWA TIMUR. AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SITUBONDO
Gosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	PABU, 1/12/04	10.00	-KONSULTASI JUDUL	[Signature]
2.				[Signature]
3.	SEMIN, 6/12/04	20.30	-KONSULTASI BAB I, II	[Signature]
4.				[Signature]
5.	RABU, 8/12/04	10.00	-REVISI BAB I, II	[Signature]
6.	SENIN, 13/12/04	20.30	-KONSULTASI BAB III, IV	[Signature]
7.	KAMIS, 16/12/04	20.30	-REVISI BAB III, IV	[Signature]
8.	KAMIS, 23/12/04	20.30	-ACC UNTUK DIUJI	[Signature]
9.				[Signature]
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

No. Faktur Penjualan /
Kontrak / Order *) :**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

Nomor Seri : cyjv - 627 - 0001249

PENGUSAHA KENA PAJAK :

Nama : **KOPKAR LISNA SITUBONDO**

Alamat : Jln. Cempaka No. 35 Situbondo

N P W P : **0 1 3 4 2 4 1 5 5 6 2 7 0 0 0**

No. Pengukuhan PKP : No. 627 00656.06.91 Tanggal : 24 Juni 1991

Tanggal Penyerahan / Pembayaran *) :

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP :

Nama : PT. PLN (PERSERO) Cabang Situbondo

Alamat : Jln. Cempaka No. 35 Situbondo

N P W P : **0 1 0 0 1 6 2 9 3 6 2 7 0 0 0**

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn (Rp.)
	tarifnya dan servis bulan Februari 2004 sesuai perincian terlampir			8.215.900,-
Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)				8.215.900,-
Dikurangi potongan harga				
Dikurangi uang muka yang telah diterima				
Dasar Pengenaan Pajak				7.469.900,-
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak				746.900,-

TARIF	D P P	PPn. BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Situbondo, Tgl. 11. Maret 20 04.



DEPARTEMEN KEHUKUMATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAP **1**
Untuk Arsip WP

BANYUWANGI

NPWP : 0 1 - 0 0 1 - 6 2 9 - 3 - 6 2 7 - 0 0 2

NAMA WP : PT. PLN (PERSERO) AP & J - SITUBONDO

ALAMAT : Jl. Cempaka no. 35
SITUBONDO

APKode Jenis Pajak : Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

Masa PPh pasal 23

0 1 1 4 1 0 0

Masa Pajak

Tahun

2 0 0 4

Jan Feb ~~Mars~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Dilihat dalam kerangka pajak

Untuk setiap bulan telah akan dalam tahun ini, yang berkoreksi

Revisi Ketetapan

Revisi Nomor Surat Ketetapan : N/P, N/PAN, N/PK/PPH

Jumlah Pembayaran

Tertiblah

Satujuta Enamratus Sembilanpuluh DuaRibu -
Tajuhatus Tigapuluh Lima Rupiah 000

1.592.735

Diterima oleh Kantor Pemerinta Pembayar

Tempat: **PT. PLN BAYAR LUNAS**

Tempat dan Tanggal

30 Mei 2004

PT. PLN (Persero) Cabang

Nama Jelas

Wajib Pajak / Penyctor

Situbondo, tgl. 30 Maret 2004

Cup dan tanda tangan

Nama Jelas

KUSNADI

Ruang Valdasi Kantor Pemerinta Pembayaran

Dilihat dalam kerangka pembayaran

2 (032.04)

di

BANYUWANGI

SURAT PEMBERITAHUAN (-SPT-) MASA PPH PASAL 23 DAN PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01-001-629-3-627-002
 Nama : PT. PLN (Persero) Distribusi Jalin AP. Situbondo.
 Alamat : Jl. Campaka no. 35 Situbondo.

**B. Pajak penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa :
 MARET 2004 dan telah disetor tanggal : 30-03-2004 adalah sebagai berikut :**

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Jenis Penghasilan	MAP/Kode	Jumlah Penghasilan Bruto	Persentase Penghasilan Netto (%)	Tarif	Pph Yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Dividen	0114101	Rp	-	-	-
2.Bunga (*)	0114102	Rp	-	15%	Rp
3.Bunga tabungan yang dibayarkan oleh Koperasi	0114101	Rp	-	15%	Rp
4.Bunga tabungan diluar Koperasi	0114102	Rp	-	15%	Rp
5.Royalti	0114103	Rp	-	15%	Rp
6.Hadiah dan penghargaan	0114109	Rp	-	15%	Rp
7.Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan penggunaan harta *)	0114109	Rp	-	15%	Rp
8.Jasa Yurik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan Keperolehan Konstruksi	0114104	Rp	25.101.818	20%	Rp 755.456
9.Jasa Lain ex PK Dirjen Pajak	0114104	Rp	-	15%	Rp
10.Jasa Peneliharaan	0114104	Rp	15.288.000	40%	Rp 617.280
B.		Rp	-	15%	Rp
C.		Rp	-	15%	Rp
D.		Rp	-	15%	Rp
Jumlah		Rp	42.159.818		Rp 1.692.736

Terdapat : 144 SATUJUTA ENAMRATUS SEMBILANPULUH DUARIBU TUJUHATUS NGAPULUH LIMA RUPAH 000.....

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Jenis Penghasilan	MAP/Kode	Jumlah Penghasilan Bruto	Persentase Penghasilan Netto (%)	Tarif	Pph Yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Dividen	0117101
2.Bunga (*)	0117102
3.Royalti	0117103
4.Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan penggunaan harta *)	0117109
5.Hadiah dan penghargaan	0117104
6.Hadiah dan penghargaan	0117109
7.Penjualan dan pembelian	0117103
8.Perjualaan Harta di Indonesia	0117103
9.Premi Asuransi Kecelakaan	0117103
10.Penghasilan Renta Pajak	0117103
BUT setelah pajak	0117103
Jumlah	

Terdapat :

- C. Catatan**
- 1. Surat Keterangan Pajak sebanyak (2) - Lembar
 - 1 Surat Kuasa Khusus
 - 1 Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26
 - 1 Bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 sebanyak (2) - Lembar
 - 1 Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan atau pasal 26 dan bunga dipotong yang dibayarkan oleh Koperasi sebanyak (2) - Lembar
 - 1 Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh pasal 26 dipotong berdasarkan 1000 Perjanjian Pengalihan Hak Berwujud (PKB)

D. Penghasilan yang telah dipotong merupakan beban pemotongan dalam asumsi

9 APR 2004


Situbondo, 15 April 2004
 Pemotong Pajak / Kuasa
 KUSNAO A

1. Untuk setiap dokumen yang diserahkan oleh Wajib Pajak dan/atau Pemotong Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

BUKTI PEMOTONGAN PPh Pasal 23

Nomor : 7/III.BTB/2004

N P W P : 01-342-415-5-627-000

Nama Wajib Pajak : KOPKAR LISNA

Alamat : JL.CEMPAKA 35 SITUBONDO

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Netto	Tarif	Pph Yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dividen	Rp -	-	15%	Rp -
2	Bunga *)	Rp -	-	15%	Rp -
3	Bunga & diskonto Obligasi	Rp -	-	15%	Rp -
4	Royalti	Rp -	-	15%	Rp -
5	Hadiah dan Penghargaan	Rp -	-	15%	Rp -
6	Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan penggunaan Harta**)	Rp -	-	10%	Rp -
7	Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan kecuali Konsultan Konstruksi Jasa Lain ex.SK Dirjen Pajak No.KEP305/PJ/2001 :	Rp -	-	15%	Rp -
8	a. Jasa Cleaning Service	Rp 7.400.000	40%	15%	Rp 445.140
	b.	Rp -	-	15%	Rp -
	c.	Rp -	-	15%	Rp -
	Jumlah				Rp 445.140

Tertarif :
***** Empatpuluh Empatpuluh Delapanpuluh Seratus Empatpuluh Rupiah *****

Situbondo, 12 Maret 2004

Pemotong Pajak

NPWP : 1-001-029-3-627-002

Nama : PT PLN (PERSERO)
AP SITUBONDO

ASMAN KEUANGAN

KUSNADI

PERHATIAN :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong tidak merupakan jaminan atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun Pajak yang bersangkutan.

2. Stempel bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertahankan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

3. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diad dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk bunga pinjaman yang dipotong oleh bank

**) Kecuali sewa tanah dan bangunan

***) Apabila kurang harap diuraikan.

DAFTAR NILAI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 / PASAL 28

MASA M A R E T TAHUN 2004

N P W P / Alamat WP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Obyek Pajak (Rp.)	Pph yang dipotong (Rp.)	Ket.
		Nomor	Tanggal			
4	4	5	6	7		8
Pasal 23						
01-342-415-5-61,000	KOPKAR LISNA	0170/04	12/03/04	Rp 2.050.000	Rp 41.000	
01-342-415-5-62,000	KOPKAR LISNA	0270/04	12/03/04	Rp 18.000.000	Rp 430.000	
01-342-415-5-63,000	KOPKAR LISNA	0370/04	12/03/04	Rp 9.181.818	Rp 275.455	
01-342-415-5-627,000	KOPKAR LISNA	0440/04	15/03/04	Rp 7.458.000	Rp 448.140	
01-342-415-5-127,000	KOPKAR LISNA	0500/04	15/03/04	Rp 7.458.000	Rp 448.140	
Jumlah PPh pasal 23				Rp 42.160.818	Rp 1.682.735	
Pasal 28						
- : : N I H I L : : -						
Jumlah PPh pasal 28				Rp -		

Situbondo, 15 April 2004

Pemotong Pajak

NPWP: 1.001.129.3.827.002

Nama : PT. PLN (PERSERO) SITUBONDO

Tanda tangan nama dan cap

ASMAN KEUANGAN

KUSNADI

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BERTUPA PAJAK
 TRIWULAN : Ke-1 Tahun 2004

APBN / APBN / LOAN / HIBAH *)

No	JENIS PAJAK	SWPU / PLM MEMIKUT / PERHOTONG					MASA / PLM DPUNGKIT / DIPOTONG			JUMLAH
		Januari 2004	Februari 2004	Mei 2004	Februari 2004	Mei 2004	Februari 2004	Mei 2004	(dalam Rp)	
VI	Pajak Daerah & Retribusi Daerah :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pajak Hotel dan Restoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pajak Hiburan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pajak Reklame	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	-	-	-	-	-	650.829.055	-	646.875.945	1.575.819.920
	9. Pajak Pemertasaan Air, Beach Tennis dan Air Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. Retribusi Priznan Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13. Pajak Daerah & Retribusi Daerah Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H :	37.709.869	38.949.918	60.786.543	685.241.535	572.560.079	670.569.468	2.155.817.512		

Situbondo, 19 April 2004

ASMAN KEUANGAN

(Handwritten signature)
 K U S N A D I A

Digital Repository Universitas Jember

N (PERSERO)
 SEMIS DIST. JAWA TIMUR
 PELAYANAN SITUBONDO

DAFTAR BUKTI ASLI LEMBAR KE-1 PEMUNGUTAN / PEMOTONGAN

PPH PASAL 22 DAN PPH PASAL 23 OLEH PIHAK LAIN

TRIWULAN: Ke I Tahun 2004

PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK		PPH Ps.22		PPH Ps.23		KETERANGAN
NAMA	N P W P	Rupiah	Lembar	Rupiah	Lembar	
JANUARI 2004						
POTIK DIPONEGORO	07.185.808.8.627.000	150.894	1 Lbr	0		
T. GE LIGHTING INDONESIA	01.682.131.5.615.000	251.682	1 Lbr	0		
POTIK SITUBONDO	06.566.666.9.627.000	72.831	1 Lbr	0		
OPKAR * L I S N A *	01.342.415.5.627.000	0		765.667	3 Lbr	
FEBRUARI 2004						
POTIK DIPONEGORO	07.185.808.8.627.000	221.409	1 Lbr	0		
T. GE LIGHTING INDONESIA	01.682.131.5.615.000	37.636	1 Lbr	0		
POTIK SITUBONDO	06.566.666.9.627.000	102.878	1 Lbr	0		
OPKAR * L I S N A *	01.342.415.5.627.000	0		322.500	2 Lbr	
D. TUNAS HARAPAN JAYA	06.633.607.4.627.000	57.750	1 Lbr			
D. DIAN	06.834.819.1.627.000	64.320	1 Lbr			
D. KARTINI	06.568.441.0.627.000	41.250	1 Lbr			
V. MAHKOTA	01.211.109.5.627.000	0		241.280	2 Lbr	
V. KARYA UTAMA	01.517.155.5.627.000	0		343.773	2 Lbr	
MARET 2004						
POTIK DIPONEGORO	07.185.808.8.627.000	199.702	1 Lbr			
POTIK SITUBONDO	06.566.666.9.627.000	77.751	1 Lbr			
OPKAR * L I S N A *	01.342.415.5.627.000	37.500	1 Lbr	1.892.735	5 Lbr	
V. KARYA UTAMA	01.517.155.5.627.000	52.920	1 Lbr			
V. PUTRA AGUNG SEMESTI	02.001.579.8.627.000	57.750	1 Lbr			
Jumlah :		1.375.163		3.385.955		

Situbondo, 19 April 2004

ASMAN KIUANGAN

KUSNADI

SURAT PERJANJIAN

antara

**PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SITUBONDO
Nomor : 020.Pj/061/APJ.STB/2004**

dengan

**KOPERASI KARYAWAN "LISNA" SITUBONDO
Nomor : 020.Pj/KP.L/III/2004**

tentang

**JASA CLEANING SERVICE
DI PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SITUBONDO**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua ribu Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PUGUH DWI ATMANTO** : Selaku Manajer PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo berdasarkan surat kuasa substitusi General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur No. 020.Sku/021/UBD-JATIM/2002 tanggal 05 Juni 2002, bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo berkedudukan di Jalan Cempaka No.35 Situbondo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **TOTOK ASMITO** : Selaku PH. Manajer Koperasi Karyawan "LISNA" berdasarkan Nota Dinas Nomor: 13/30/KP.L/K/STB/2004, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan "LISNA" berkedudukan di Jalan Cempaka No.35 Situbondo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama yang mengikat mengenai pekerjaan Cleaning Service di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo yang selanjutnya diuraikan pada pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1. JENIS DAN LOKASI PEKERJAAN

- 1.1 PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan menjaga kebersihan Gedung dan halaman Kantor yang meliputi kegiatan :
 - Membersihkan Lantai
 - Membersihkan dinding, langit-langit dan lampu-lampu
 - Membersihkan jendela, kaca dan pintu
 - Membersihkan perlengkapan dan perabot kantor,
 - Membersihkan kamar mandi dan Toilet
 - Membersihkan halaman dan merawat tanaman.
 - Membantu/menyiapkan segala sesuatu pada acara-acara dinas (rapat, upacara, pertemuan dan lain-lain).
 - Membantu pemasangan instalasi dilingkungan kerja PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Situbondo
 - Membantu pemindahan arsip.
 - Membersihkan pesawat telepon / airpan

- 1.7 Lokasi pekerjaan yang harus dibersihkan oleh PIHAK KEDUA meliputi :

No.	Lokasi	Luas (m ²)	
		Gedung	Halaman
1	Kantor PT. PLN (Persero) AP Situbondo	2.094	416
2	Kantor PT. PLN (Persero) Bondowoso	293	337
3	Kantor Jaga Prajean	63	617
4	Kantor PLTM Sampitan Baru	172	588
5	Kantor Kembangsambi	63	100
	Jumlah	2.685	2.058

Pasal 2.
SARANA DAN FASILITAS KERJA

Untuk pelaksanaan pekerjaan seperti tercantum pada pasal 1 semua sarana dan fasilitas kerja disediakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3.
HARGA BORONGAN

- 3.1 Pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan biaya setiap bulan dan sudah termasuk PPN 10 % sebesar Rp. 8.215.900,- (Delapan juta Dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) dengan asumsi perincian harga satuan sebagai berikut:
- Harga borongan Gedung Rp.2.125,-/m² per bulan
 - Harga borongan Halaman Rp.1.220,-/m² per bulan

Pasal 4.
PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilakukan setiap 1(satu) bulan sekali oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA mengajukan surat permintaan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5.
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

- 3.1. PIHAK KEDUA wajib memenuhi hak-hak normatif ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi petugas yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- 3.2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas perbuatan petugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA dan/atau bagi pihak lain baik materiil maupun non materiil.
- 3.3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan alat-alat/barang-barang fasilitas kerja milik PIHAK PERTAMA, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian petugas PIHAK KEDUA.
- 3.4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa petugas PIHAK KEDUA pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugasnya.

Pasal 6.
PERSYARATAN TENAGA KERJA

- 6.1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut pada pasal 1 menggunakan petugas yang mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- 6.2. PIHAK KEDUA wajib melengkapi seragam dinas dan tanda pengenal pada petugas untuk pekerjaan tersebut pada pasal 1 sesuai surat perjanjian ini.
- 6.3. PIHAK KEDUA sanggup mengganti petugasnya yang telah melakukan pelanggaran/kesalahan dan melakukan perbuatan yang merugikan baik kepada PIHAK PERTAMA maupun kepada Pihak Lain.

PIHAK KEDUA sebagai pengganti Pasal 6.6 apabila tidak sesuai dan akan PIHAK PERTAMA dinilai bahwa petugas PIHAK KEDUA tidak/kurang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai pasal 1.

- 6.5 PIHAK KEDUA membuat daftar petugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- 6.6. Perubahan/penggantian Petugas PIHAK KEDUA harus atas persetujuan PIHAK PERTAMA

Pasal 7. LARANGAN

- 7.1. PIHAK KEDUA dilarang melimpahkan / mengalihkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Lain.
- 7.2. Petugas PIHAK KEDUA dilarang meminta imbalan berupa sesuatu apapun kepada Pihak Lain selama berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai pasal 1.
- 7.3. PIHAK KEDUA dilarang menuntut biaya apapun kepada PIHAK PERTAMA selain yang ditentukan dalam perjanjian ini.

Pasal 8. SANKSI - SANKSI

Kesalahan / kelalaian dari petugas PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerugian baik kepada PIHAK PERTAMA maupun kepada Pihak Lain, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi-sanksi sebagai berikut :

- 8.1. PIHAK PERTAMA membuat teguran secara lisan kepada petugas PIHAK KEDUA yang telah melakukan pelanggaran/kesalahan
- 8.2. PIHAK PERTAMA membuat teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran yang dilakukan oleh petugasnya dan PIHAK KEDUA wajib memberikan sanksi kepada Petugasnya berupa teguran tertulis.
- 8.3. Apabila Petugas PIHAK KEDUA telah mendapat teguran tertulis sampai 3(tiga) kali maka PIHAK KEDUA harus segera mengganti petugas tersebut.
- 8.4. Untuk pelanggaran yang bersifat kriminal (penerasan, penipuan, pencurian listrik dll) yang dilakukan oleh Petugas PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti Petugas yang melakukan pelanggaran kriminal tersebut meskipun pelanggaran itu baru dilakukan 1(satu) kali.
- 8.5. Disamping Sanksi berupa teguran dan penggantian petugas maka PIHAK KEDUA juga dikenakan sanksi berupa ganti rugi atas pelanggaran/kesalahan yang dilakukan Petugas PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak lain sesuai pasal 5 perjanjian ini.
- 8.6. PIHAK PERTAMA memutuskan hubungan kerja sama secara sepihak dengan PIHAK KEDUA apabila teguran-teguran tersebut pada point 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan 8.5 tidak diindahkan.

Pasal 9. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 9.1. Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 atau sampai salah satu pihak menyatakan memutuskan hubungan kerja.
- 9.2. Apabila salah satu pihak bermaksud tidak memperpanjang perjanjian ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 10.1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dikemudian hari, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.
- 10.2. Apabila dengan cara musyawarah belum juga mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Situbondo.

**Pasal 11.
LAIN - LAIN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini atau kemungkinan adanya perkembangan keadaan yang timbul dikemudian hari sehingga perlu mengadakan peninjauan kembali surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum.

**Pasal 12.
PENUTUP**

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Situbondo oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TOK ASMITO

PIHAK PERTAMA,

SUGUH DWIATMANTO

